

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
LUAS WILAYAH, DAN TOTAL ASET TERHADAP BELANJA MODAL  
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**ARTIKEL**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**SASDI YABSA RUDSAN**  
**14043060/ 2014**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
LUAS WILAYAH DAN TOTAL ASET TERHADAP BELANJA MODAL  
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh :

SASDI YABSA RUDSAN  
14043060/2014

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode  
September 2016 dan telah diperiksa/ditetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 29 Juli 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP : 19730213 199903 1 00

Pembimbing II



Vita Fitria Sari, SE, M.Si  
NIP. 19870515 201012 2 009

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, LUAS  
WILAYAH, DAN TOTAL ASET TERHADAP BELANJA MODAL PADA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Sasdi Yabsa Rudsan**

**Fakultas ekonomi universitas negeri padang**

**Email: [sasdirudsan@gmail.com](mailto:sasdirudsan@gmail.com)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, luas wilayah dan total aset terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2010-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah teknik total sampling, yakni seluruh populasi dijadikan sampel. Jumlah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat adalah 19 Kabupaten dan Kota. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (sig. 0,102). (2) Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (sig. 0,000). (3) Luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (sig. 0,002). (4) Total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (sig. 0,508).

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah, Total Aset, Belanja Modal

**Abstract**

This study examine to determine the effect of local revenues, general allocation fund, total area and total assets to capital expenditures on local government districts and cities in West Sumatra. The population in this study are all districts and cities in West Sumatra province of tahn 2010-2014. The sample in this study was a total sampling technique, the entire population sampled. The number of districts and cities in West Sumatra is the 19th District State dam. The analysis is done by using a multiple regression model. The results of this study indicate that: (1) Own-source revenue is not significant effect on capital expenditure (sig. 0.102). (2) the general allocation fund a significant effect on capital expenditure (sig. 0.000). (3) The area of significant effect on capital expenditure (sig. 0.002). (4) Total assets no significant effect on capital expenditure (sig. 0.508).

**Keyword:** Local revenues, general allocation fund, Broad Areas, Total Assets, Capital Expenditure.

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk itu tahun 2000 diberlakukan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Belanja modal menurut Permendagri No 13 tahun 2006 adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif, pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melaksanakan aktifitas pembangunan (Saragih, dalam Saptaningsih, 2008). Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belanja modal sangat penting ditingkatkan untuk program program pelayanan publik untuk berbagai kepentingan publik.

Pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat pada laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2010-2014 yang bersumber website dirjen perimbangan keuangan daerah kementerian keuangan. Porsi belanja modal pada tahun 2009 rata rata masih 21%, tahun 2010 rata rata belanja modal mengalami penurunan menjadi 16%, tahun 2011 rata-rata belanja modal mengalami peningkatan menjadi 18%, dan pada tahun 2012 rata-rata belanja modal sebesar 18%, sedangkan pada tahun 2013

rata-rata belanja modal meningkat sebesar 20% terhadap belanja daerah.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah melalui Menteri Dalam Negeri agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30 persen. Kementrian dalam negeri melalui Dirjen keuangan daerah pada tahun 2013 menargetkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan Persentasi belanja modal 28 persen dari belanja daerah dan pada tahun 2014 menargetkan mencapai 30 persen dan diharapkan setiap tahunnya meningkat, tetapi faktanya masih banyak pemerintah daerah yang merasa sulit untuk mencapai target ([keuda.kemendagri.go.id./artikel](http://keuda.kemendagri.go.id./artikel)).

Berdasarkan dari fakta rata-rata persentase belanja modal di kabupaten/kota di Sumatera Barat masih jauh lebih rendah dari rata rata target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Undang undang nomor 33 tahun 2004 pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus

(DAK). Selain itu juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) menurut Undang undang No 34 tahun 2000 adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah (subsidi). Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan pendapatan asli daerah tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 49, 2009)

Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal (Undang-undang No 33 tahun 2004). Permasalahan

dana alokasi umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi pusat dana alokasi umum dijadikan sebagai instrumen *horizontal imbalance*. Bagi daerah, dana alokasi umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan pembiayaan daerah. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan luas wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

Total aset adalah seluruh kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis yang diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengukuran berdasarkan pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Penganggaran modal (*capital budgeting*) adalah sebuah proses pengambilan keputusan oleh manajemen atas kegiatan yang akan memberikan tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) lebih

dari satu tahun. Dari berbagai definisi diatas penulis bisa mengambil kesimpulan apakah total aset besar atau kecil pada suatu pemerintah daerah bisa mempengaruhi daerah dalam mengambil keputusan dalam menentukan belanja modalnya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik Siswanto pada tahun 2012, wilayah penelitian kabupaten/kota diseluruh Indonesia DAU tidak menunjukkan pengaruh positif alokasi terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah, luas wilayah, silpa berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian juga dilakukan oleh Edi melanto, Betri, Cherry Dhia wenny yang dilakukan di 15 Kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 menyimpulkan pendapatan asli daerah, luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Bertolak dari uraian diatas maka peneliti bermaksud melakukan Penelitian ini untuk menguji seberapa besar Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, Luas wilayah, dan total aset terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota diprovinsi Sumatera Barat. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada tahun

penelitian yang terbaru, lokasi penelitian dan penulis juga menambahkan variabel lainnya yaitu total aset.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Belanja Modal**

#### **Definisi Belanja Modal**

Belanja modal menurut Permendagri No 13 tahun 2006 adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No. 91/PMK.06/2007). Sedangkan menurut pedirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset tetap lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan belanja modal dapat dikategorikan 5 kategori utama yaitu :

- 1) Belanja modal tanah  
Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian balik nama dan sewa tanah pengkosongan, pengurangan, peralatan, pemotangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin  
Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran biaya yang dapat digunakan untuk pengadaan/pemeliharaan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta

inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai

3) Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan dan irigasi yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan. Pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran

untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan dan irigasi yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak non pajak yang berisi hasil dari perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (bastian,2002). Menurut Undang undang No 34 tahun 2000 PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian diatas yang diambil dari Undang –undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah, hal tersebut mengidikasikan bahwa DAU lebih di

prioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah

Menurut Undang undang No 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk provinsi dan Kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat "*block grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah

Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur unsur terkait terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Ardhini 2011). Undang undang No 33 tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana persatuan wilayah. Kesimpulan dari pernyataan diatas bisa diartikan semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar pelayanan publik yang baik

Total aset adalah seluruh kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis yang diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengukuran berdasarkan pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas.

### **Keterkaitan Antar Variabel**

#### **Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal**

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber asli daerah dan dapat digunakan untuk belanja daerah terutama diharapkan dapat dioptimalkan untuk belanja modal. Masalah keagenan (*agency problem*) senantiasa terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses penentuan target pendapatan dan pengalokasian sumber daya dalam belanja daerah. Masyarakat sebagai *principal* memberikan wewenang pengaturan dan memberikan sumber daya (dalam bentuk pajak daerah, retribusi dan lain lain) kepada pemerintah sebagai agen untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola

pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi:2009).

### **Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal**

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas desentralisasi dan pembantuan. Adapun sumber sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain lain penerimaan yang sah.

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluaran kebutuhannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan

didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

### **Pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal**

Undang undang No 33 tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana persatuan wilayah, semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar pelayanan publik yang baik

### **Pengaruh total aset terhadap belanja modal**

Total aset/kekayaan mencerminkan kekayaan yang dimiliki oleh daerah pada akhir tahun yang salah satunya berupa aset tetap, jika nilai ekonomis aset/aktifa sudah habis maka akan mempengaruhi belanja modal, artinya belanja modal harus bertambah untuk pembelian aset. Selain itu jumlah aset/aktifa yang dimiliki daerah menunjukkan jumlah harta yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pembelian atau pengadaan aset/aktifa melalui anggaran belanja modal tentu karna ada kebutuhan sehingga menjadi

ukuran untuk daerah dalam memenuhi layanan publik

### **Hipotesis penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian teori yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1: pendapatan Asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal
- H2 : Dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal
- H3 : Luas wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal
- H4 : Total aset berpengaruh positif terhadap belanja modal

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kausalitas, penelitian kausalitas merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

### **Populasi dan sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Penentuan sample ditetapkan dengan teknik total sampling, yakni seluruh populasi dijadikan sample.

Jumlah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat adalah 19 kabupaten dan kota. Berarti sample yang digunakan juga sebanyak 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

### **Definisi operasional**

Untuk lebih terarahnya penelitian yang dilakukan maka dapat dikemukakan definisi operasional sebagai berikut

#### **1. Belanja modal**

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/investaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

#### **2. Pendapatan asli daerah**

PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Data PAD diambil dari laporan realisasi APBD akun pendapatan asli daerah.

### 3. Dana alokasi umum

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Data dana perimbangan yang meliputi diambil dari laporan realisasi APBD pada akun dana alokasi umum.

### 4. Luas wilayah

Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

### 5. Total aset

Seluruh Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data tabel terlihat bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 19 pemerintah

daerah, data selama rentang waktu 2010-2014

### Uji Normalitas

Hasil pengujian ini memperlihatkan nilai sig lebih besar dari  $\alpha$ , jadi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan uji normalitas data ini berdistribusi normal yaitu nilai sig  $0.899 > 0.05$  dengan menggunakan *one sample kolmogorov smirnov test*, artinya uji asumsi klasik untuk regresi berganda terpenuhi.

### Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* yang kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada hubungan korelasi antar variabel independent. Variabel PAD ( $X_1$ ) dengan nilai VIF 5.165, dan DAU ( $X_2$ ) dengan nilai VIF 3,042, luas wilayah ( $X_3$ ) dengan nilai VIF 1,416 dan total aset ( $X_4$ ) dengan nilai VIF 2,897 kecil dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bahwa tidak terdapat korelasi variabel variabel antara satu dengan yang lainnya, variabel independent dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

### Uji heterokedisitas

Dalam uji ini dapat dilihat nilai signifikan untuk variabel PAD, DAU, luas wilayah, dan total aset adalah 0,900, 0,891, 0,739, 0,759.

Apabila hasil signifikannya  $> 0,05$  maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Berdasarkan dari tabel 11 dapat dilihat dari angka sebesar 1,332 yang berada diantara -2 dan 2. Berarti dalam hal ini sudah dapat diambil keputusan bahwa model regresi ini tidak terdapat autokorelasi.

### Koefisien Regresi berganda

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa

1. Nilai konstanta sebesar Rp 19.062.592.994 menunjukkan bahwa tanpa adanya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, luas wilayah, dan total asset, jumlah belanja modal tersebut telah mencapai sebesar Rp 19062592994
2. Koefisien PAD sebesar 0,307 mengidentifikasi bahwa setiap peningkatan PAD satu satuan akan mengakibatkan peningkatan belanja modal sebesar 0,307 satuan.
3. Koefisien DAU sebesar 0,163 mengidentifikasi bahwa setiap peningkatan DAU satu satuan akan mengakibatkan peningkatan belanja modal sebesar 0,163 satuan
4. Koefisien luas wilayah sebesar 7421746 mengidentifikasi bahwa setiap peningkatan satu satuan luas wilayah akan

mengakibatkan peningkatan belanja modal sebesar 7421746

5. Koefisien total asset sebesar -0,003 mengidentifikasi bahwa setiap peningkatan jumlah total asset satu satuan akan mengakibatkan penurunan belanja modal sebesar -0,003

### Uji determinan (R<sup>2</sup>)

*Adjusted R Square* pada tabel 13 menunjukkan 0,602, hal ini mengidentifikasi bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, luas wilayah dan total aset berpengaruh terhadap belanja modal daerah sebesar 58,4% sedangkan 41,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji statistik

Dari hasil pengolahan data dengan F-test (ANNOVA) didapat hasil dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka model regresi yang digunakan sudah fixs, artinya secara bersama sama semua variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel variabel penelitian.

### Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel 12 diketahui nilai t hitung dan signifikansi dari masing masing variable, maka uji hipotesis pertama,

kedua, ketiga dan keempat adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama adalah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Nilai  $t_{tabel}$  pada  $\alpha=0,05$  adalah 1.66216. nilai t hitung untuk variable pendapatan asli daerah 2.221, dengan demikian dapat diketahui bahwa  $t_{hitung}<t_{tabel}$  yaitu  $1.654<1.66216$  ( $sig>0,05$ ) yaitu  $0,102>0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.
2. Hipotesis kedua adalah dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Nilai  $t_{tabel}$  pada  $\alpha=0,05$  adalah 1.66216. nilai t hitung untuk variable dana alokasi umum 4.777, dengan demikian dapat diketahui bahwa  $t_{hitung}>t_{tabel}$  yaitu  $4.777>1.66216$  ( $sig<0,05$ ) yaitu  $0,00<0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
3. Hipotesis ketiga adalah luas wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Nilai  $t_{tabel}$  pada  $\alpha=0,05$  adalah 1.66216. nilai t hitung untuk variable luas wilayah 3.274, dengan demikian dapat

diketahui bahwa  $t_{hitung}>t_{tabel}$  yaitu  $3.274>1.66216$  ( $sig<0,05$ ) yaitu  $0,02<0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

4. Hipotesis keempat adalah total asset tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Nilai  $t_{tabel}$  pada  $\alpha=0,05$  adalah 1.66216. nilai t hitung untuk variable total aset -530, dengan demikian dapat diketahui bahwa  $t_{hitung}>t_{tabel}$  yaitu  $-530<1.66216$  ( $sig>0,05$ ) yaitu  $0,598>0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa total asset berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerahnya masing-masing dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di provinsi Sumatera barat masih menggunakan pendapatan asli daerahnya untuk biayaoperasionalnya belum

digunakan untuk merealisasikan belanja modalnya.

Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU no 22 tahun 1999 (revisi menjadi UU 32 tahun 2004) dan UU No 25 tahun 1999 (revisi menjadi UU 33 tahun 2004). Dalam UU 32 tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi, dimana otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun non keuangan. Penelitian ini menghasilkan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Sumatera secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hasil ini mengindikasikan desentralisasi fiskal yang diberikan kepada daerah yaitu dengan memberi wewenang dan pengelolaan dari sektor keuangan daerah dari pendapatan asli daerah yang diterima oleh masing masing kabupaten/kota dipergunakan untuk belanja daerah yang bersifat rutin dan operasional dan belum digunakan untuk peningkatan belanja modal. Hal ini didukung oleh rata-rata pendapatan asli daerah di

pemerintah daerah di Sumatera Barat yang hanya Rp. 47. 147. 444.191 ini jauh lebih rendah dari pada rata PAD skala nasional yang berjumlah RP 115.069.103.870. Alasan lain kenapa PAD tidak berpengaruh signifikan (bukan faktor penentu) terhadap belanja modal pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat adalah adanya masalah keagenan (*agency problem*) dimana pihak eksekutif yaitu pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat mengajukan anggaran untuk disetujui oleh pihak legislatif. Hal ini senantiasa terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses penentuan target pendapatan dan pengelolaan sumber daya dalam belanja daerah. Hal ini penting menjadi perhatian pemerintah karna rata-rata realisasi pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2010-2014 hanya 6 persen dari pendapatan daerah

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman dan I Ketut (2014) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Kusnandar dan Dodik (2012) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi pendapatan belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Saptaningsih (2008) juga sama dengan menyatakan

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal

Daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah. Pendapatan asli daerah secara statistik belum berpengaruh terhadap belanja modal dapat sedikit memberi acuan bahwa pendapatan asli daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah hendaknya lebih memacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri, dengan peningkatan pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah bisa lebih leluasa untuk mengalokasikan setiap pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan daerah sehingga bisa berdampak baik kepada masyarakat.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa dana alokasi umum yang diterima setiap daerah di Provinsi Sumatera Barat telah digunakan untuk pembangunan

daerah yang terlihat dari belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riko (2014) di Kabupate/Kota di provinsi Kalimantan barat menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Imam dan Andri (2015) Kabupaten Kota seluruh Indonesia juga menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana alokasi umum yang merupakan salah satu dana perimbangan yang berkontribusi paling besar pada pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Barat diharapkan kedepannya untuk terus dioptimalkan dan ditingkatkan penggunaannya untuk belanja modal yang menyentuh langsung kepada pelayanan publik dengan mengurangi belanja pegawai, belanja operasional, belanja perjalanan dinas dan belanja rutin lainnya.

### **Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal**

Dalam penjelasan Undang-undang no 33 tahun 2004, salah satu variable yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Provinsi

Sumatera barat sangat dipengaruhi oleh luas daerah itu sendiri. Luas wilayah suatu daerah dapat dijadikan ukuran suatu daerah untuk mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan terutama berupa pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jaringan. Pembangunan infrastruktur berupa jalan akan mempermudah akses kesuatu daerah dan dapat memperlancar arus barang dari daerah satu kedaerah yang lain. Lancarnya arus barang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya, dan hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edi dan chery (2014) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal dan hasil penelitian yang sama dilakukan Kusnandar dan Dodik (2013) Kabupaten/Kota seluruh Indonesia juga menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal.

Kedepannya, diharapkan bagi pemerintah daerah di provinsi Sumatera barat terutama bagi daerahnya yang luas maka diharapkan memberikan dan meningkatkan terus realisasi belanja modalnya karna kebutuhannya sangat besar dalam memberikan pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur yang membantu peningkatan ekonomi daerah.

## **Pengaruh Total Aset Terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total asset tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Sumatera barat belum menjadikan total asset sebagai pertimbangan untuk merealisasikan sejumlah pendapatannya untuk belanja modal.

Hasil Uji variabel total aset tidak terbukti berpengaruh terhadap belanja modal daerah disebabkan kebanyakan pemerintah daerah memiliki aset yang kurang produktif untuk menciptakan daya saing daerah. Seharusnya aset yang dimiliki daerah lebih diutamakan aset yang bernilai produktif sehingga bisa meningkatkan daya saing dan layanan kepada masyarakat. Hasil ini sejalan dengan Eka, Akram dan Lilik Handayani (2014) pada kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara barat yang menyatakan bahwa total asset tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Diharapkan kedepannya, pemerintah daerah diharapkan di Provinsi Sumatera Barat dapat menjadikan total aset di akhir tahun anggaran, sebagai bahan pertimbangan awal untuk menentukan anggaran belanja modalnya di tahun berikutnya.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah pengaruh pendapatan asli daerah, dana lokasi umum, luas wilayah, dan total aset terhadap belanja modal adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal artinya pendapatan asli daerah belum dialokasikan kepada belanja modal.
2. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal artinya jika dana alokasi umum meningkat maka belanja modal juga meningkat.
3. Luas wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal, artinya jika suatu wilayah yang luas maka membutuhkan belanja modal yang besar pula.
4. Total aset tidak berpengaruh terhadap belanja modal, artinya total aset yang dimiliki suatu daerah belum menjadi bahan pertimbangan bagi daerah untuk belanja modalnya.

### **Saran**

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sebaik mungkin pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya agar terciptanya perekonomian yang baik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi yang sistematis dan rasional sehingga diperoleh pendapatan asli daerah yang riil dimiliki daerah untuk membiayai belanja modalnya.
2. Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan yang besar dalam membiayai belanja daerah dan belanja modalnya. Harus disadari bahwa tidak semua pengeluaran yang direncanakan penting dilakukan, pemerintah daerah seharusnya menguji belanja yang terjadi, barangkali terdapat pengeluaran yang perlu dikurangi atau tidak perlu dikeluarkan agar alokasi dan realisasi belanja modal lebih besar.
3. Luas wilayah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal,

maka diharapkan kepada pemerintah daerah yang wilayah pemerintahannya luas agar dapat meningkatkan belanja modalnya.

4. Untuk peneliti selanjutnya, mungkin variabel total aset bisa dikeluarkan dan memasukkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi belanja modal lainnya seperti SILPA, jumlah penduduk, dan lain lain

#### Daftar pustaka

Catur sasongko, 2010 , Anggaran, jakarta Salemba empat jakarta

Edi meianto, Betri,cheria dweny, 2014 pengaruh dana alokasi umum pendapatan asli daerah luas wilayah terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera selatan

Halim abdul, 2002. Akuntansi Sektor publik, akuntansi keuangan daerah, Jakarta; Salemba empat

Kementerian dalam negeri,dirjen keuangan daerah 20013

Kementrian dalam negeri.2010.*kode dan data wilayah provinsi,kab/kota 2010.17 desember 2015*

Kusnandar,Dodik siswantoro, 2012, Pengaruh Dana alokasi

umum pendapatan asli daerah luas wilayah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal,jurnal akuntansi universitas indonesia

Mahmudi,2009. Manajemen keuangan daerah. Yogyakarta; Erlangga

Mardiasmo,2002, otonomi & Manajemen keuangan daerah, yogyakarta,penerbit Andi yogyakarta

Nur indah rahmawati, 2010, Pengaruh Pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada kab/kota di Jawa tengah

Peraturan Menteri Dalam Negri No 13 tahun 2006 Tentang pengelolaan keuangan Daerah

Peraturan Menteri keuangan daerah No 91 / PMK 06/2006

Peraturan Pemerintah N0 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daeah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang pemerintah daerah

Riko nofrianto,rafiudin hanifah, 2014, pengaruh pendapatan asli daerah dana

perimbangan dan kinerja  
keuangan terhadap belanja  
modal pemerintah  
kabupaten/kota provinsi  
kalimantan barat

Saptaningsih, 2008. pengaruh  
pendapatan asli daerah, dana  
alokasi umum, dana alokasi  
khusus, terhadap belanja  
modal kab/kota di Provinsi  
D.I Yogyakarta

Suandy, Erly. (2000). *Hukum Pajak*.  
Jakarta : Salemba Empat

Undang –undang No 33 tahun 2000  
tentang perimbangan  
Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan  
daerah

Undang-undang No 28 tahun 2009  
tentang pajak daerah dan  
retribusi daerah

Yuriko ferdian, 2013, pengaruh  
pendapatn asli daerah dana  
perimbangan terhadap  
belanja daerah  
kabupaten/kota di Sumatera  
barat, *skripsi universitas  
Negeri padang*

## Lampiran 1

**Tabel 2**  
**Laporan Realisasi Belanja Modal Tahun 2010-2014**  
**(dalam ribuan rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	Y (Belanja Modal)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kabupaten Kep. Mentawai	41.061.124	121.499.999	154.692.196	245.571.478	197.535.039
2	Kabupaten Pesisir Selatan	126.924.606	130.156.648	129.353.609	167.901.834	213.290.988
3	Kabupaten Solok	73.377.975	87.150.482	134.972.370	144.289.579	175.926.481
4	Kabupaten Sijunjung	44.458.061	123.590.896	102.256.552	159.054.412	144.579.544
5	Kabupaten Tanah Datar	100.819.888	77.789.333	86.485.201	128.063.359	123.046.706
6	Kabupaten Padang Pariaman	85.421.066	117.812.493	132.395.640	153.471.143	202.289.753
7	Kabupaten Agam	131.243.930	85.773.795	87.372.216	162.504.027	153.139.999
8	Kabupaten 50 Kota	55.398.436	103.062.699	112.620.661	163.994.894	191.760.605
9	Kabupaten Pasaman	36.425.615	95.942.304	109.266.843	148.872.058	157.967.854
10	Kabupaten Solok Selatan	47.917.815	112.347.133	145.807.625	165.589.773	183.842.531
11	Kabupaten Dhamasraya	80.431.348	112.970.512	145.502.095	157.124.312	183.618.751
12	Kabupaten Pasaman Barat	46.771.373	88.860.334	150.888.247	153.342.775	193.092.373
13	Kota Padang	49.987.905	140.574.073	219.990.523	289.610.361	272.848.994
14	Kota Solok	84.884.336	61.945.809	104.394.127	88.837.904	83.812.815
15	Kota Sawahlunto	112.195.612	70.671.344	67.756.762	68.692.918	88.084.914
16	Kota Padang Panjang	134.235.934	66.418.478	47.111.849	272.862.875	64.712.665
17	Kota Bukit Tinggi	101.140.919	50.457.245	50.734.638	76.293.325	76.551.550
18	Kota Payakumbuh	75.640.592	45.509.175	66.385.767	77.987.938	105.244.228
19	Kota Pariaman	54.623.552	11.442.239	80.614.090	131.623.978	127.563.060
	rata-rata	78.050.531	89.682.894	112.031.632	155.562.576	175.534.035

Sumber: olahan data DJPK Kemenkeu, DPKD Prov Sumatera barat

## Lampiran 2

**Tabel 3**  
**Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2014**  
**(dalam ribuan rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	X1 (Pendapatan asli daerah)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kabupaten Kep. Mentawai	28.324.291	37.724.585	34.639.147	31.302.499	36.444.071
2	Kabupaten Pesisir Selatan	16.819.727	30.280.287	40.254.884	47.703.257	86.599.821
3	Kabupaten Solok	19.620.321	30.631.854	26.479.471	31.491.005	51.502.148
4	Kabupaten Sijunjung	21.973.847	28.195.592	32.813.105	38.098.006	54.261.421
5	Kabupaten Tanah Datar	36.843.263	51.552.513	53.691.047	63.835.094	99.694.236
6	Kabupaten Padang Pariaman	24.706.049	27.073.433	31.287.086	42.619.950	62.821.048
7	Kabupaten Agam	22.952.164	37.894.248	41.572.966	49.954.057	79.418.015
8	Kabupaten 50 Kota	17.435.267	24.039.630	24.936.552	33.095.121	52.829.534
9	Kabupaten Pasaman	16.094.170	25.781.757	33.037.265	46.023.666	72.878.860
10	Kabupaten Solok Selatan	7.360.806	14.800.641	22.054.660	22.222.385	32.342.605
11	Kabupaten Dhamasraya	25.572.655	34.423.462	39.200.742	33.711.644	52.811.257
12	Kabupaten Pasaman Barat	24.205.105	28.646.697	32.493.954	36.826.531	69.925.195
13	Kota Padang	116.691.283	149.874.800	189.450.840	238.871.897	315.675.797
14	Kota Solok	18.574.273	23.695.904	23.320.507	24.140.145	29.522.681
15	Kota Sawahlunto	23.782.088	36.382.150	34.887.767	37.104.574	48.580.391
16	Kota Padang Panjang	27.256.576	30.507.444	32.420.607	66.053.953	51.601.386
17	Kota Bukit Tinggi	33.847.174	42.223.418	45.076.555	55.203.592	61.613.681
18	Kota Payakumbuh	36.642.757	44.561.136	50.708.914	54.177.948	65.900.626
19	Kota Pariaman	14.884.538	17.048.308	17.578.732	20.639.405	26.677.826
	rata-rata	28.083.492	37.649.361	42.416.042	51.214.459	67.959.776

Sumber: olahan data DJPK Kemenkeu, DPKD Prov Sumatera barat

## Lampiran 3

**Dana Alokasi Umum Tahun 2010-2014**  
(dalam ribuan rupiah)

No	Kabupaten/kota	X2 (dana alokasi umum)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kabupaten Kep. Mentawai	287.489.909	322.850.029	371.174.681	465.535.454	531.389.939
2	Kabupaten Pesisir Selatan	454.097.271	514.113.570	609.139.244	689.380.494	753.984.939
3	Kabupaten Solok	415.421.036	481.015.459	521.759.479	588.040.074	651.730.691
4	Kabupaten Sijunjung	291.098.176	331.390.878	389.425.714	448.681.128	498.591.200
5	Kabupaten Tanah Datar	390.379.990	432.459.186	520.092.334	587.104.249	650.563.368
6	Kabupaten Padang Pariaman	417.865.290	464.407.373	558.234.576	633.453.395	683.752.765
7	Kabupaten Agam	435.507.286	490.177.293	595.713.049	676.516.360	739.359.873
8	Kabupaten 50 Kota	411.513.040	466.795.847	550.759.741	632.930.786	700.183.206
9	Kabupaten Pasaman	323.271.519	361.794.551	426.264.647	481.180.159	542.067.878
10	Kabupaten Solok Selatan	245.504.063	264.086.203	315.024.093	351.506.736	406.540.345
11	Kabupaten Dhamasraya	266.175.621	297.587.682	351.295.616	400.374.128	450.393.254
12	Kabupaten Pasaman Barat	350.371.158	437.992.674	457.694.684	523.534.850	580.406.954
13	Kota Padang	632.117.457	711.416.059	871.875.666	1.003.116.093	1.060.917.648
14	Kota Solok	210.134.688	237.102.087	280.495.627	318.606.999	354.372.862
15	Kota Sawahlunto	202.073.979	225.119.750	268.961.519	396.397.490	336.999.766
16	Kota Padang Panjang	213.332.947	239.694.890	269.610.492	1.211.386.196	341.743.150
17	Kota Bukit Tinggi	242.306.440	272.853.718	326.224.306	368.311.195	404.285.567
18	Kota Payakumbuh	246.791.255	260.148.619	325.023.247	369.115.746	412.929.814
19	Kota Pariaman	236.689.036	262.870.144	299.255.003	343.061.622	386.256.228
	rata-rata	330.112.640	372.309.264	437.264.406	552.012.271	551.919.445

Sumber: olahan data DJPK Kemenkeu, DPKD Prov Sumatera barat

## Lampiran 4

**Luas Wilayah 2010-2014  
(Dalam Km<sup>2</sup>)**

No	Kabupaten/Kota	X3 (luas wilayah)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kabupaten Kep. Mentawai	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
2	Kabupaten Pesisir Selatan	5.749	5.749	5.749	5.749	5.749
3	Kabupaten Solok	3.738	3.738	3.738	3.738	3.738
4	Kabupaten Sijunjung	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
5	Kabupaten Tanah Datar	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
6	Kabupaten Padang Pariaman	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
7	Kabupaten Agam	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804
8	Kabupaten 50 Kota	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571
9	Kabupaten Pasaman	3.947	3.947	3.947	3.947	3.947
10	Kabupaten Solok Selatan	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
11	Kabupaten Dhamasraya	2.961	2.961	2.961	2.961	2.961
12	Kabupaten Pasaman Barat	3.887	3.887	3.887	3.887	3.887
13	Kota Padang	693	693	693	693	693
14	Kota Solok	71	71	71	71	71
15	Kota Sawahlunto	231	231	231	231	231
16	Kota Padang Panjang	23	23	23	23	23
17	Kota Bukit Timggi	25	25	25	25	25
18	Kota Payakumbuh	85	85	85	85	85
19	Kota Pariaman	66	66	66	66	66
	rata-rata	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211

Sumber : olahan data dari kementerian dalam negeri

## Lampiran 5

**Jumlah total aset 2010-2014**  
**(dalam ribuan rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	X4 (total aset)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kabupaten Kep. Mentawai	981.776.997	1.113.637.183	1.257.643.336	1.450.847.031	1.666.860.663
2	Kabupaten Pesisir Selatan	1.128.810.326	1.068.737.113	1.348.179.902	1.425.714.800	1.740.772.449
3	Kabupaten Solok	1.061.909.484	1.294.879.214	1.415.839.638	1.586.742.736	1.831.964.059
4	Kabupaten Sijunjung	1.290.186.190	1.408.162.005	1.518.677.470	1.698.676.376	1.976.502.927
5	Kabupaten Tanah Datar	820.768.034	861.516.680	677.561.233	958.274.469	1.055.630.792
6	Kabupaten Padang Pariaman	1.857.249.289	2.036.071.624	2.108.056.274	855.118.993	1.092.650.923
7	Kabupaten Agam	2.248.125.007	2.329.481.831	2.462.374.481	2.798.725.545	2.993.714.810
8	Kabupaten 50 Kota	1.308.054.753	1.422.650.873	1.550.798.841	1.734.565.597	1.986.446.526
9	Kabupaten Pasaman	1.657.626.442	1.790.740.937	1.934.053.288	2.056.569.970	2.281.973.272
10	Kabupaten Solok Selatan	605.051.314	661.271.268	779.162.071	1.327.611.170	996.254.201
11	Kabupaten Dhamasraya	861.513.153	1.023.868.708	1.133.474.055	1.323.627.965	1.463.957.910
12	Kabupaten Pasaman Barat	1.446.838.136	1.571.065.638	1.696.770.025	1.942.369.568	2.176.525.950
13	Kota Padang	2.965.580.058	3.181.983.232	3.867.900.182	5.226.920.846	7.885.040.700
14	Kota Solok	1.048.008.646	1.120.200.836	1.189.541.612	1.350.747.576	1.513.516.292
15	Kota Sawahlunto	645.620.216	755.939.005	825.323.898	920.236.528	1.001.156.316
16	Kota Padang Panjang	667.117.035	641.446.419	771.318.803	842.727.463	914.062.887
17	Kota Bukit Tinggi	1.647.080.468	1.693.863.731	1.770.303.733	1.839.137.716	2.035.683.171
18	Kota Payakumbuh	895.422.460	957.693.964	1.081.515.290	1.097.948.433	1.209.901.212
19	Kota Pariaman	724.641.749	829.516.841	922.862.028	1.067.779.519	1.075.464.439
	rata-rata	1.255.862.092	1.355.933.005	1.490.071.377	1.658.123.279	1.942.004.184

Sumber; Olahan data dari DPKD Provinsi Sumatera Barat

Lampiran 6

**Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	95	11442239328.0 0	289610361000. 00	118001405441. 7158	55599457779.8 7377
X1	95	7360806893.00	315678797930. 00	47147444191.7 053	45258325657.6 4915
X2	95	202073979000. 00	1211386196000 .00	448627978394. 8317	188627682083. 44260
X3	95	23.00	6011.00	2210.8421	1941.31742
X4	95	605051314494. 00	7885040700285 .00	1540398788065 .7046	980859788917. 12980
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Data sekunder olahan 2016

**Non Parametric Tests**

**Hypothesis Test Summary**

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of Unstandardized Residual is normal with mean -0.000 and standard deviation 35,086,274,856.90.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.899	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Lampiran 7

**Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	19062592994.128	11102051058.014		1.717	.089		
	X1	.307	.186	.250	1.654	.102	.194	5.165
	X2	.163	.034	.554	4.777	.000	.329	3.042
	X3	7421746.579	2267209.621	.259	3.274	.002	.706	1.416
	X4	-.003	.006	-.060	-5.30	.598	.345	2.897

Sumber: Hasil olahan SPSS 20

### Uji heterokedastisitas

Correlations			Unstandardized Residual
X1	Correlation Coefficient		-.013
	Sig. (2-tailed)		.900
	N		95
X2	Correlation Coefficient		-.014
	Sig. (2-tailed)		.891
	N		95
Spearman's rho X3	Correlation Coefficient		-.035
	Sig. (2-tailed)		.739
	N		95
X4	Correlation Coefficient		.032
	Sig. (2-tailed)		.759
	N		95
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient		1.000
	Sig. (2-tailed)		.
	N		95

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil olahan SPSS 20

## Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.776 <sup>a</sup>	.602	.584	35857493906.5 7535	1.332

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil olahan spss 20

## Adjusted R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.776 <sup>a</sup>	.602	.584	35857493906.5 7535

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

## Anova

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1748637840756	4	4371594601892	34.000	.000 <sup>b</sup>
		92880000000.000		3220000000.000		

**Coefficients<sup>a</sup>**

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error			
19062592994.128	11102051058.014		1.717	.089
.307	.186	.250	1.654	.102
.163	.034	.554	4.777	.000
7421746.579	2267209.621	.259	3.274	.002
-.003	.006	-.060	-.530	.598

Sumber: Hasil olahan SPSS 20